

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil proses akuntansi selama periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Laporan keuangan dirancang untuk menyediakan informasi keuangan tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. Disisi lain, Pemerintah daerah membuat suatu laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan oprasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun yaitu paling lambat akhir Maret tahun berikutnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa satuan kerja perangkat daerah selaku entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Al-Quran juga disebutkan untuk bertanggungjawab atas amanat yang telah diberikan.

(Q.S. An-Nisa' : 58) yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat tersebut diperkuat oleh Hadits Dari Abu Hurairah yang berbunyi :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتُكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :

“Tunaikanlah Amanat kepada orang yang membrikanmu amanat, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud no. 3535, Tirmidzi no. 1264)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas pemerintah daerah selaku organisasi non profit yang diberi amanat untuk mengelola dana baik dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat daerah itu sendiri berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola dana yaitu dengan menyusun laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut sebelum disampaikan kepada masyarakat luas harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah tetapi juga memeriksa sistem pengendalian internal. Menurut Faishol (2016) dalam pengelolaan keuangan daerah Sistem Pengendalian Internal mempunyai peran yang penting untuk memberikan keyakinan dan efisiensi serta keandalan dalam membuat laporan keuangan. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sumber daya manusia dan teknologi informasi, yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuan. Pengendalian internal adalah proses yang dibuat untuk memastikan

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan (Tuanakotta, 2014). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa salah satu tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah keandalan laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern menjadi hal yang penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal. Selain dipengaruhi oleh pengendalian internal juga dipengaruhi oleh teknologi informasi salah satunya yaitu sistem akuntansi.

Menurut Andini (2015) selain sistem pengendalian internal sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Definisi dari akuntansi keuangan adalah pengelolaan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen (Andini, 2015). Sistem akuntansi keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Hal ini karena banyaknya transaksi di pemerintah daerah baik transaksi keuangan maupun transaksi non keuangan, maka dengan sistem akuntansi keuangan daerah selain mempercepat waktu juga akan meminimalisir risiko kesalahan dalam pencatatan. Menurut Andelina & Hariyanto (2017) sistem akuntansi adalah koordiansi antar manusia yang terstruktur dalam pengelolaan data akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan. Agar koordinasi antar manusia dapat berjalan dengan baik dan terstruktur diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang meliputi wawasan, karakter, dan perilaku seseorang. Menurut Siwambudi, et. al (2017) Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ada pada diri seseorang sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik tertentu. Kompetensi merupakan keterampilan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang didukung oleh sikap (Rahayu, 2020). Salah satu sub unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah adalah kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Dengan kebijakan ini berarti organisasi harus menyiapkan pegawai yang memiliki kompetensi serta memiliki integritas dan etika yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya, khususnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal. Dengan kompetensi tersebut manusia dapat membuat laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan.

Laporan keuangan merupakan catatan yang berisi informasi keuangan dari periode tertentu. Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja anggaran, dan arus kas yang dibutuhkan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan dan evaluasi. Menurut Faishol (2016) dalam akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi sektor publik. Untuk membuat laporan keuangan diperlukan rangkaian dan tahap-tahap yang harus dilalui dan diataur dalam

sistem akuntansi pemerintahan (Herawati, 2014). Dalam pengelolaan laporan keuangan pegawai harus sungguh-sungguh maka dari itu perlu adanya komitmen dalam organisasi.

Komitmen organisasi adalah kondisi dimana seorang pegawai memihak dan mempertahankan menjadi anggota suatu organisasi. Komitmen organisasi adalah keinginan untuk menetap dan mempertahankan pekerjaan dalam organisasi Siwambudi, et. al (2017). Menurut Ikhsan (2009) komitmen organisasi adalah tingkatan seorang pegawai memihak dan seberapa besar kontribusi pegawai tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi sangat dibutuhkan dalam organisasi supaya karyawan yang mempunyai kompetensi tinggi bisa dipertahankan dan tercapainya tujuan organisasi (Siwambudi et al., 2017).

Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang ditetapkan dan dilakukan secara valid dan tepat waktu. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perancangan dan penyusunan laporan keuangan secara wajar yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan pengendalian internal yang memadai sehingga memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan daerah berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan

Keuangan (BPK) meliputi bukti, angka, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemilihan prosedur berdasarkan pertimbangan profesional dari pemeriksa, termasuk dalam penilaian risiko salah saji material pada laporan keuangan. Setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK memberikan opini, ada empat macam opini yang diberikan oleh BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Saat melakukan penilaian risiko hal yang dipertimbangkan oleh pemeriksa adalah pengendalian internal serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Kota Yogyakarta mencakup ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi serta melakukan evaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Tabel 1.1

Opini Pemeriksaan BPK

No	Nama Pemda	Opini WTP	Tahun Laporan Keuangan
1	Provinsi DIY	12 kali	2009-2021
2	Kota Yogyakarta	13 kali	2009-2021
3	Kab. Bantul	10 kali	2009-2021
4	Kab. Sleman	11 kali	2009-2021
5	Kab. Kulon Progo	9 kali	2009-2021
6	Kab. Gunung Kidul	7 kali	2009-2021

Sumber : (<https://yogyakarta.bpk.go.id/hp-lkpd/>)

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 10 Januari 2022 untuk diperiksa. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya. Menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Kota Yogyakarta menyajikan secara wajar laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memeriksa sistem pengendalian internal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 ditemukan permasalahan yang berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 1.118 kasus dan permasalahan berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang sebanyak 1.720 kasus (yogyakarta.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-2). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat WTP tetapi ditemukan beberapa permasalahan dalam sistem pengendalian internal, antara lain :

1. Pengelolaan aset tetap yang belum tertib.
2. Pengelolaan yang belum efektif pada piutang pajak dan retribusi.
3. Pengelolaan yang belum tertib pada izin reklame.

Melansir jogja.antaranews.com (2022) berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu pengelolaan tenaga kontrak dan kegiatan pembangunan. Dalam jogja.antaranews.com (2022) Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY Widhi Widayat mengatakan diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta bisa menjadi contoh untuk Pemerintah Daerah lain.

Supaya Pemerintah Kota Yogyakarta bisa menjadi contoh untuk Pemerintah Daerah lain seperti yang diharapkan Kepala BPK RI Perwakilan DIY Widhi Widayat maka kualitas laporan keuangan harus dipertahankan sehingga opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dapat dipertahankan untuk tahun selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan Gustina (2021) meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya tersebut sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2021) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hilir. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mangacu pada penelitian terdahulu Rahayu (2020) penelitian ini menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi karena ingin mengetahui apakah variabel moderasi tersebut mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dan lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan penelitian ini dilakukan di SKPD Kota Yogyakarta serta alat analisis pada penelitian terdahulu menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) sedangkan penelitian ini menggunakan SmartPLS 3.0. Maka dari itu peneliti ingin membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris komitmen organisasi dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris komitmen organisasi dalam memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris komitmen organisasi dalam memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang bisa diperoleh sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengembangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai informasi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan bisa mendukung penelitian terdahulu mengenai kualitas laporan keuangan serta menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan akuntansi sektor publik pada bidang sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk perguruan tinggi penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dibidang akuntansi sektor publik tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai sarana informasi yang bermanfaat untuk masyarakat mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan cara survey tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.